

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Oleh karena itu, sektor perbankan mempunyai peran yang sangat dominan dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Karena begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga muncul anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, serta tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Sektor perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu baik atau tidak. Dendawijaya dalam Astuty & Asri (2014) bank sebagai lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat atau disebut sebagai dana pihak ketiga lalu

masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit pada bank.

Krisis moneter tahun 1997 - 1998 yang melanda perekonomian Indonesia telah berimbas pada sektor perbankan. Krisis ini diawali dengan devaluasi nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS telah menimbulkan kredit macet dan melunturkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, hal tersebut menyebabkan melemahnya fungsi intermediasi perbankan. Masyarakat kala itu lebih banyak menarik dananya yang ada di bank swasta dan mengalihkannya ke bank yang dianggap aman (*flight to safety*), yaitu bank asing dan bank BUMN. Untuk mencegah hal ini bank-bank mematok suku bunga dananya dengan sangat tinggi, yang diikuti dengan penyesuaian suku bunga kredit. Penyaluran kredit perbankan praktis terhenti karena sektor riil tidak mampu menyerap dana yang mahal harganya.

Dunia perbankan mengalami perkembangan, khususnya pada bank umum konvensional, berdasarkan kepemilikannya bank umum konvensional di Indonesia dibagi menjadi 5 (lima) kelompok bank, yaitu Bank Persero (bank milik pemerintah), Bank Swasta (devisa dan non devisa), Bank Pembangunan Daerah (bank milik pemerintah daerah), Bank Campuran (milik swasta nasional dan asing), dan Bank Asing (Siamat, 2004).

Bank Umum (Commercial Bank) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (Commercial Bank), Bank Syariah (Sharia Bank), dan Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank) berada di Bank

Umum. Dana Pihak Ketiga ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit (Pratama, 2010).

Kegiatan bank umum meliputi kegiatan sebagai berikut: menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan memberikan jasa bank lainnya (*service*) (Kasmir, 2012). Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yang dilakukan oleh bank merupakan kegiatan pokok sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya sebagai kegiatan pendukung. Menurut Frianto Pandia (2012) dalam alokasi dana bank, kredit menempati prioritas ketiga, namun porsi yang paling besar dibanding dengan alokasi dana untuk aktiva lainnya. Saat ini bank umum menyalurkan rata-rata 70% sampai 90% dari dana yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan untuk kredit. Begitu pula pendapatan bank, sebagian besar didapatkan dari pemberian kredit.

Penyaluran kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko terbesar dalam bank juga bersumber dari penyaluran kredit. Keuntungan yang didapat berasal dari suku bunga yang ditetapkan oleh bank saat pemberian kredit masyarakat. Penyaluran kredit berguna untuk pihak yang kelebihan dana agar dananya tidak menjadi *idle* sehingga pihak yang kelebihan dana tersebut dapat meminjamkan dana kepada pihak yang kekurangan dana agar menjadi lebih efektif. Dana tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan oleh pihak yang kekurangan dana.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga.

Setiap perbankan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah penyaluran kreditnya namun hal tersebut tidak berlaku bagi pertumbuhan kreditnya. Pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia mengalami fluktuasi naik turun. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, pertumbuhan kredit industri perbankan hingga akhir 2019 hanya 6,08 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dari pertumbuhan kredit tahun lalu yang mencapai 11,7 persen (*year on year/yoy*) (Fauzia, 2020). Pertumbuhan kredit yang melambat ini disebabkan oleh indikator rasio kredit bermasalah (NPL) yang meningkat menjadi 2,53 persen pada tahun 2019 dibanding 2,3 persen pada tahun 2018.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan penyakit dalam perbankan dan memiliki dampak yang negatif dalam penyaluran kredit. Semakin besarnya kredit macet maka semakin meningkat pula nilai NPL suatu bank dan kredit yang disalurkan semakin sedikit karena bank tidak mempunyai dana untuk menyalurkannya kembali akibat kredit macet dan bank juga tidak menyalurkan kreditnya karena mempunyai resiko tinggi terhadap hutang tak tertagih. Kategori kredit bermasalah yaitu kredit yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia menerapkan rasio NPL untuk perbankan yaitu dibawah 5 persen. Seperti yang ditulis oleh Muchlis (2018) bahwa *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah saat ini masih tinggi kisaran 2,59 persen. Selain itu banyak juga debitur yang menahan pencairan pinjaman yang sudah didapatkan, sehingga *undisbursed loan* juga naik signifikan. Tingkat NPL pada tahun 2017 sempat turun dari tahun sebelumnya, namun

penurunan itu tidak bertahan lama. Peningkatan rasio NPL tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah kredit bermasalah tetapi lambatnya penyaluran kredit. Seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, bahwa pada tahun 2017 NPL sempat turun menjadi 2,59 persen. Namun pada Januari 2018 kembali naik menjadi 2,68 persen dan bulan berikutnya menjadi 2,88 persen (Fauzie, 2018). Dilihat dari Data Statistik Perbankan Indonesia pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia tahun 2015-2019, diperoleh data seperti berikut:

Tabel I. 1 Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan Indonesia pada tahun 2015-2019 dalam persen (%)

Tahun	Kelompok Bank (Dalam Persen)						
	Bank Persero	BUSN Devisa	BUSN Non Devisa	BPD	Bank Campuran	Bank Asing	Bank Umum
2015	15.98	7.76	4.63	9.06	9.09	2.43	10.44
2016	14.51	9.41	-61.95	8.85	3.37	-3.43	7.87
2017	11.55	8.73	18.43	9.09	1.90	-16.98	8.24
2018	14.09	8.39	14.38	8.01	16.25	22.24	11.75
2019	8.54	7.86	13.33	10.15	-25.98	-6.01	6.08

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan penyaluran kredit bank umum dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. BUSN Devisa dan BUSN Non Devisa merupakan perbankan yang mengalami fluktuasi naik turun yang signifikan. Pada tahun 2016-2019 BUSN Devisa selalu mengalami penurunan pertumbuhan penyaluran kredit. Dalam hal ini peningkatan penyaluran kredit tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan kredit dikarenakan beberapa faktor seperti dana pihak ketiga yang menurun. Pada tahun 2015 sampai 2016 BUSN Devisa mengalami kenaikan pada pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 1,65 persen dari 7,76 persen

menjadi 9.41 persen atau sebesar Rp 1.596.781 miliar menjadi Rp 1.747.080 miliar. Sedangkan pada BUSN Non Devisa mengalami penurunan pada pertumbuhan penyaluran kredit sebesar -66,58 persen dari 4,63 persen menjadi -61,95 persen atau sebesar Rp 131.833 miliar menjadi Rp 50.163 miliar. Pada tahun 2017-2019 pertumbuhan penyaluran kredit BUSN Devisa dan BUSN Non Devisa mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan bank lain. Jumlah pertumbuhan penyaluran kredit yang berbeda diantara dua bank ini diakibatkan karena jumlah dana pihak ketiga yang mengalami fluktuasi naik turun. Namun Bank Umum Swasta Nasional mempunyai strategi untuk menghindari dari kredit macet, Bank Umum Swasta Nasional mempertahankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam hal pemberian kredit dan kriteria penyeleksian nasabah untuk meminjam kredit serta adanya tahap survey yang ketat terhadap nasabah yang akan meminjam sehingga tingkat kredit macet pada Bank Umum Swasta Nasional lebih kecil dibandingkan dengan bank umum lainnya (Lestari, 2014). Oleh karena itu, perlu dipahami mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada bank umum swasta nasional yang akan berdampak pada kinerja suatu industri perbankan tersebut.

Faktor pertama yang mempengaruhi penyaluran kredit adalah dana pihak ketiga. Muljono dalam Yuwono & Meiranto (2012) dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kenaikan jumlah simpanan dana yang ada pada bank, membuktikan adanya pertumbuhan DPK yang akan mempengaruhi tingkat kecukupan bank dalam menyalurkan kembali dananya dalam bentuk kredit. Bank melakukan berbagai cara untuk menjaga kepercayaan dan memberi rasa aman bagi nasabah yaitu dengan

menjaga tingkat likuiditas. Apabila jumlah DPK pada suatu bank meningkat, maka dana yang dapat diolah perbankan otomatis lebih banyak disalurkan dalam bentuk kredit sehingga memperoleh keuntungan yang banyak pula. Oleh karena itu sektor perbankan berlomba-lomba untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat agar dapat menyalurkan kredit sebesar-besarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia tahun 2015 - 2019, perkembangan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum mengalami fluktuasi naik turun.

Tabel I. 2 Perkembangan DPK Perbankan Nasional Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	Kelompok Bank (Dalam Persen)						
	Bank Persero	BUSN Devisa	BUSN Non Devisa	BPD	Bank Campuran	Bank Asing	Bank Umum
2015	9.64	5.21	4.34	6.14	8.92	9.09	7.26
2016	14.36	12.32	-62.20	7.55	4.58	3.76	9.60
2017	11.58	8.63	17.35	17.17	2.45	-16.94	9.36
2018	8.97	3.64	10.87	6.25	8.02	7.59	6.45
2019	7.00	6.49	15.70	11.47	-11.68	3.31	6.54

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (data diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia tahun 2015-2019, perkembangan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh setiap perbankan nasional mengalami fluktuasi naik turun. BUSN Devisa mengalami fluktuasi pertumbuhan DPK, dimana pada tahun 2016 dan tahun 2019 DPK mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 hingga tahun 2018 DPK tumbuh melambat. Hal ini berbeda dengan jumlah DPK nya yang meningkat setiap tahun. Pada BUSN Non Devisa mengalami hal yang sama yakni fluktuasi pada pertumbuhan DPK setiap tahunnya, seperti halnya

pertumbuhan kredit yang mengalami fluktuasi. Dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit yang disalurkan oleh bank umum. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pudji Astuti dan Asri (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi jumlah penyaluran kredit adalah suku bunga kredit. Penghasilan bunga dari penyaluran kredit ini merupakan sumber pendapatan utama yang diterima bank. Bank selaku kreditur memiliki kemampuan dalam menentukan suku bunga kreditnya. Karena semakin tinggi suku bunga kredit yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Bunga kredit adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank (Kasmir, 2016). Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank akan menyebabkan nasabah tidak tertarik untuk menggunakan jasa pelayanan perbankan tersebut sehingga beralih kepada bank lain yang dapat memberikan bunga pinjaman lebih rendah (Supiatno, S, et al., 2014). Dengan suku bunga kredit yang rendah, masyarakat dapat memanfaatkan penawaran kredit yang diberikan oleh Bank Umum tanpa harus takut oleh beban bunga kredit yang tinggi. Suku bunga kredit (pinjaman) mengacu pada *BI rate*. Jika *BI rate* mengalami kenaikan maka suku bunga kredit akan mengalami kenaikan pula, begitu pun sebaliknya. *BI rate* dijadikan pedoman dalam menentukan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit pada setiap perbankan di Indonesia.

Tabel I. 3 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan di Indonesia pada tahun 2015 – 2019 dalam persen (%)

Kelompok Bank	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Persero	12.24	11.44	11.06	10.51	10.30
BPD	13.06	12.40	11.97	11.50	11.20
BUSN	13.08	12.44	11.39	11.01	10.55
Bank Campuran	16.99	15.99	13.86	13.16	13.19
Bank Umum	12.82	12.05	11.30	10.82	10.52

Sumber: SEKI (data diolah).

Berdasarkan data tabel diatas, suku bunga kredit pada tiap bank mengalami penurunan setiap tahunnya. Suku bunga kredit ini menurun karena BI rate juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dilihat dari mulai Bank Persero hingga Bank Campuran suku bunga kredit mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali Bank Campuran yang mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tabel tersebut terlihat BUSN dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Ketika suku bunga kredit mengalami penurunan seharusnya pertumbuhan kredit mengalami peningkatan. Namun dalam hal ini pertumbuhan kredit justru mengalami penurunan pula.

Menurut berita yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa perlambatan pertumbuhan kredit terjadi saat suku bunga kredit sebenarnya turun. Rata-rata suku bunga kredit pada tahun 2019 adalah 10,5%, turun sedikit dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 10,8% (Wareza, 2020).

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit dan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa pokok masalah yang mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada bank umum sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia.
2. Terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit dan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Suku Bunga Kredit berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia?

3. Apakah Suku Bunga Kredit dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional di Indone

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan serta referensi mengenai suku bunga kredit dan dana pihak ketiga serta pengaruh keduanya terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen bank umum dalam menentukan jumlah penyaluran kredit sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi di Indonesia.